

ISSN : 2302-7169

# JURNAL EKONOMI

Volume 4 • Nomor 1 • Januari - Juni 2015



Diterbitkan oleh :  
Fakultas Ekonomi  
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Jl. Perjuangan No. 17 Cirebon

Telp. (0231) 481945 - 480588 / Fax. (0231) 485345

Website : [www.untagcirebon.ac.id](http://www.untagcirebon.ac.id) - E-mail : [fe@untagcirebon.ac.id](mailto:fe@untagcirebon.ac.id)



---

# **JURNAL EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON**

**ISSN: 2302-7169**

**PENYUNTING JURNAL EKONOMI**

**PELINDUNG**

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

**PENANGGUNG JAWAB**

Dekan Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon

**PENYUNTING**

**Ketua**

Dr. Zuki Kurniawan, SE., M.Si.

**Sekretaris**

Adie Irwan Kusumah, SE., M.Si.

**Anggota**

R. Misriah Ariyani S., SE., MM.

Sulfiani, S., Sos., M.Si.

Yunus, S.Sos

**Mitra Bestari**

Prof.Dr. H. Djalil Idris Saputra, Drs., MM.

Dr. Zuki Kurniawan, SE., M.Si.

Dr., Ir., Reza A.N. Rukmana, MM.

**Bidang Usaha**

H. Sukarno, SE., M.Si.

Dewi Nur Aryantini, S.Sos.

**Alamat Penerbit**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON**

Jl. Perjuangan No.17 Cirebon

Telp. 023 - 481945, Fax. 0231- 485345

Website: [www.untagcirebon.ac.id](http://www.untagcirebon.ac.id)

E-mail: [fe@untagcirebon.ac.id](mailto:fe@untagcirebon.ac.id)

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik 1 spasi huruf Roman dalam softcopy file dengan format MS-Word. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keperluan keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya. Redaksi berhak mengubah / memperbaiki bahasa tanpa mengubah materi tulisan. Setiap tulisan bukan cerminan pandangan dewan redaksi.

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENYUNTING JURNAL EKONOMI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....</b>	<b>1</b>
Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah	
<b>HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA ANTARA KEBUTUHAN DAN BEBAN RAKYAT.....</b>	<b>22</b>
Totok Harjanto	
<b>ALOKASI ANGGARAN DAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI MODAL UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>32</b>
Rohadin	
<b>PARIWISATA POTENSI KEKUATAN BARU EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
Rachmawati Madjid	
<b>PELAKSANAAN AHLI K3 DALAM MENINGKATKAN MENGUKUR DAN MERAMAL BESARNYA PANGSA PASAR DI PERGURUAN TINGGI WILAYAH III CIREBON.....</b>	<b>77</b>
Yanuar Barlianto	

---

**PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP  
PENJUALAN BATUBARA PADA PT. CAHAYA  
MANTINGAN NUSANTARA JAKARTA**

**(Survey pada Perusahaan batubara) ..... 92**  
Zuki Kurniawan dan Wilan Andriyani

**STRATEGI PEMASARAN PRODUK USAHA  
KECIL MENENGAH (UKM) NASIONAL  
DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....**

**113**  
Sumaryono

**PERAN SERTA PEMUDA DALAM  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 ..... 124**  
Susi Sugiarsih



# **ALOKASI ANGGARAN DAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI MODAL UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN CIREBON**

**Rohadin**

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi desa, meliputi faktor alokasi anggaran dan infrastruktur. Masalah yang akan dibahas dan dianalisis tentang bagaimana hubungan dan pengaruh antara alokasi anggaran dan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi desa, di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif menggunakan alat analisis yang track analiasis, dan hasilnya adalah sebagai berikut: Ada pengaruh yang signifikan dan positif sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon dengan urutan sebagai berikut: jumlah pengaruh 52.50 persen, sedangkan infrastruktur variabel untuk pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon dengan besarnya efek dari 8,10 persen, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi pedesaan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan jika didukung oleh pemerintah setempat alokasi anggaran maksimum yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di daerah. semakin tinggi pembangunan ekonomi desa, itu akan cenderung membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan pedesaan.

**KATA KUNCI:** Alokasi Anggaran, Infrastruktur, dan Pembangunan  
Ekonomi Pedesaan

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Masalah pembangunan ekonomi pedesaan sudah cukup sering menjadi topik pembahasan dan obyek penelitian para ahli, perencana dan pengambil kebijakan di negara ini. Sementara itu, kemiskinan pedesaan dan kesenjangan desa-kota juga menjadi topik dalam banyak diskusi mengenai pembangunan nasional. Gejala atau isu ini menjadi lebih bergema ketika ternyata hasil-hasil program pembangunan ekonomi cenderung lebih mendahulukan aspek pertumbuhan dan kepentingan masyarakat perkotaan. Masalah lainnya adalah adanya kecenderungan di kalangan para pengambil kebijakan dalam memandang desa. Seolah-olah semuanya merupakan suatu bentuk komunitas yang seragam sebagaimana desa-desa yang ada di Jawa atau setidaknya berusaha menjadikannya seragam (*uniform*). Hal ini misalnya tampak dalam pelaksanaan penerapan UU No.5 tahun 1979, meskipun Undang-undang itu sendiri sebenarnya tetap mengindahkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Akibatnya banyak usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk, seperti mengatasi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan taraf pendidikan atau mengajak hidup sehat, seringkali mengalami kegagalan. Adapun, penyebab kegagalan tersebut antara lain karena inovasi eksternal yang diterapkan ternyata tidak sesuai dengan sistem sosial budaya yang masih dianut oleh masyarakat setempat (Edhie Djatmoko 2000, h. 55)

Ada beberapa alasan mengapa pembangunan ekonomi masyarakat desa masih relevan untuk dibahas. Pertama, kendati dalam dua dasawarsa terakhir ini perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah Negara Indonesia masih didominasi oleh daerah pedesaan. Kedua, walaupun pemerintahan telah mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, namun secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan. Ketiga, persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan. Persoalan ini tidak bisa diabaikan karena bisa memicu berbagai konflik politik dan gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan, karena itu persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahannya supaya tidak mengganggu stabilitas nasional. Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia mencapai sekitar 65.000 buah dan jumlah kabupaten dan kota sebanyak kurang lebih 375 buah. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris

(*agriculture base*). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan (Rahardjo Adisasmita 2006, h.1). Sedangkan menurut Sunyoto Usman (2006, h. 56) sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kondisi sangat miskin, dan sebagian lagi mempunyai kondisi lebih baik dari pada kelompok sangat miskin, namun mereka masih tergolong kelompok miskin. Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, yang antara lain ditandai oleh tingkat pendidikan yang rendah, rentan terhadap penyakit, dan penghasilan mereka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks.

Pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian, serta tidak juga hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, implementasinya lebih dari hal itu; yakni, sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan. Sehingga, segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh (Rahardjo Adisasmita 2006, h.17). Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pada hakekatnya adalah memberdayakan orang per orang atau kelompok orang yang ada di desa agar mereka berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan yang paling dominan adalah apanya yang akan diberdayakan dari orang tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono (2006, h. 1) pemberdayaan ekonomi yang dibangun adalah manusianya yang meliputi (1) pendidikannya, (2) kesehatannya, (3) daya belinya (motivasi daya beli) dan (4) moralnya (gaya hidup). Disadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang meliputi sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan fasilitas infrastruktur yang tersedia untuk menunjang kegiatan yang meliputi

transportasi, irigasi, listrik dan telekomunikasi. Diharapkan dengan interaksi dari kualitas individu manusia di masyarakat desa dengan lingkungannya akan berpengaruh pada percepatan pembangunan ekonomi desa yang kemudian berimplikasi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Purwanto (2009, h.41) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Isu-isu pembangunan daerah seperti kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah banyak dipengaruhi karena adanya perbedaan faktor *endowment*, *human capital*, dan wilayah geografis dan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan investasi pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan sebagainya memiliki arti penting dalam pembangunan daerah karena bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti meningkatkan hubungan produsen dengan pasar, menjaga kesinambungan siklus bisnis, meningkatkan ekonomi aktivitas ekonomi produktif, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa pembiayaan atau investasi dari pemerintah daerah yang *reliable*, *sufficient* dan *sustainable* akan menjadi landasan bagi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan yang menjadi salah satu unsur pembentukan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui besarnya peningkatan pendapatan masyarakat dan besarnya pergeseran pembangunan ekonomi, maka diperlukan suatu data statistik yang dapat mengukur mengenai kegiatan dan perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan ekonomi adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah adalah sebagai suatu proses yang bersifat jangka panjang yang meliputi unsur ekonomi dan non ekonomi yang serasi sehingga diharapkan akan terciptanya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan perkapita riil dan kesejahteraan masyarakat desa disuatu daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan yang dilaksanakan



pemerintah. Berbagai program dilaksanakan dengan maksud mendorong aktifitas masyarakat di berbagai sektor, baik sektor pertanian industri, perdagangan maupun sektor lainnya. Melalui berbagai program tersebut pemerintah berharap agar masyarakat bisa melakukan aktifitas ekonomi sehingga masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu diperhatikan mengenai alokasi anggaran pemerintah daerah, infrastruktur, dan masuknya investasi.

Pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon merupakan pembangunan yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pada bulan April tahun 2011 dengan mengacu kepada visi dan misi pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2012 dengan upaya pelaksanaan 11 prioritas Nasional dan 3 prioritas lainnya yaitu : (1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4).Penanggulangan kemiskinan, (5) Ketahanan pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim investasi dan usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan hidup dan bencana, (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Adapun, tiga prioritas lainnya adalah : (1) Bidang politik, hukum, dan keamanan, (2) Bidang perekonomian, (3) Bidang kesejahteraan rakyat (Depdagri, 2012),

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dibagian Timur sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Kabupaten/Kota Cirebon yang sebagian wilayahnya terletak di sepanjang pantai laut Jawa. Daerah ini memiliki luas wilayah 990,36 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Cirebon terletak diantara 6° 30' sampai dengan 7° 00' Lintang Selatan (LS) dan diantara 108°40' sampai dengan 108°48' Bujur Timur (BT). Jarak terjauh dari arah Barat ke Timur sepanjang 54 Km dan Utara ke Selatan sepanjang 39 km. Adapun batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan, Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka, Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah). Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2005 Tentang RTRW Kabupaten Cirebon, Pusat Pelayanan di daerah dibentuk dalam 4 hirarki, yaitu : 1). Pusat Wilayah Pengembangan adalah Sumber sebagai pusat pelayanan bagi Wilayah daerah. 2). Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Ciledug, Lemahabang,

Sumber, Palimanan, dan Arjawinangun sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan. 3). Penunjang Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Losari, Astanajapura, Weru, Klangeran, dan Gegesik sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan. 4). Pusat Pengembangan Kecamatan adalah Kecamatan Waled, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karang Sembung, Susukan Lebak, Sedong, Beber, Mundu, Pangenan, Cirebon Selatan, Cirebon Utara, Dukupuntang, Depok, Plumbon, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Panguragan, Kapetakan, Kedawung, Tengahtani, Gempol, Karang Wareng, Plered, Pabuaran dan Pasaleman sebagai pusat pelayanan bagi desa-desa dalam lingkup kecamatan.

Secara demografis wilayah Kabupaten Cirebon memiliki penduduk hingga akhir Tahun 2010 sebanyak 2.170.374 jiwa yang tersebar di daerah *rural* (perdesaan) dan *urban* (perkotaan) dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.089.076 jiwa dan perempuan sebanyak 1.081.298 jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.192 jiwa/km<sup>2</sup>.

Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per Kecamatan hingga tahun 2010 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumber yaitu sebanyak 78.874 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 3,07 % dan yang terkecil adalah kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 27.482 jiwa (sebaran penduduknya 0,85 %). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang dijadikan sebagai ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB). Angka IPM Kabupaten Cirebon dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mencapai angka rata-rata 67,93. Angka ini bila dibandingkan dengan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat wilayah timur (wilayah Cirebon) masih di atas Kabupaten Indramayu tapi dibawah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon.

Adapun, dalam hal sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Cirebon terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon pada tahun 2010 sebesar 139,42 milyar rupiah dimana 16,86 % nya berasal dari retribusi daerah. Jumlah dana alokasi umum

(DAU) yang diterima oleh Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 867,30 milyar rupiah sehingga total untuk penerimaan daerah tahun 2010 ini adalah sebesar 1.488.743.155.743 rupiah. Adapun untuk pengeluaran daerah tercatat sebesar 1.488.743.155.743 rupiah di mana pengeluaran untuk belanja pegawai adalah yang sebesar yaitu 860.047.601.579 rupiah. Dilihat dari PAD d untukan besarnya pengeluaran yang ada maka Kabupaten Cirebon pada tahun 2010 ini mengalami defisit anggaran sebesar 5.367.699.213 rupiah.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Cirebon sangat tergantung pada dana perimbangan yang penerimaannya diperoleh dari pemerintah. Selain sumber-sumber di atas, penerimaan daerah dapat diperoleh melalui pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Oleh karenanya pemerintah daerah membutuhkan dana masyarakat dan swasta. Kontribusi dana masyarakat yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Cirebon lebih dari 80% dari total pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak Tahun 2003 telah mengalokasikan alokasi dana desa yang besarnya masing-masing desa berbeda tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah serta status desa yang bersangkutan. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disalurkan mulai dari Rp. 40 juta hingga Rp 65 juta, atau pada setiap tahun telah dialokasikan sebanyak Rp. 24 milyar. Selain melalui kemampuan APBD Kabupaten Cirebon, juga diupayakan perolehan bantuan desa baik dari APBN maupun APBD provinsi dalam bentuk dana tugas pembantuan, program-program pembangunan dan lain-lain.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional maka peranan perdesaan sungguh sangat penting, mengingat penduduk Indonesia sebahagian besar tinggal di perdesaan. Bertitik tolak dari realita di atas maka sangatlah penting membangun dan memberdayakan masyarakat perdesaan agar lebih sejahtera dan mampu mengendalikan arus urbanisasi dari desa ke perkotaan. Apabila arus urbanisasi dari desa ke perkotaan tidak dikendalikan secara proporsional dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru di perkotaan terutama yang menyangkut masalah social dan ekonomi dengan segala eksisnya (Suryadi 2009, h.273) sedangkan Rahardjo Adisasmita (2006) dalam kata pengantarnya mengemukakan bahwa kenyataan menunjukkan pembangunan daerah pedesaan belum memuaskan hasilnya sedangkan pembangunan perkotaan mengalami kesemrawutan, kepadatan dan kemacetan, oleh karena itu dibutuhkankonsep-konsep pembangunan pedesaan dan perkotaan yang



*acceptable* (dapat diterima), *reliable* (meyakinkan), dan *implementable* (dapat dilaksanakan)

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan berbagai program pembangunan telah dilakukan, perencanaan dan implementasinya. Keterkaitan pembangunan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan diharapkan dapat di upayakan untuk bersifat dua arah, saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga menjadi relatif seimbang, tidak berat sebelah dan bersifat harmoni, sehingga daerah pedesaan dapat tumbuh dan berkembang lebih intensif dan ekstensif dibandingkan sebelumnya, dengan demikian penduduk pedesaan tidak perlu meninggalkan desanya, karena didesanya telah tersedia kesempatan kerja yang luas baik disektor pertanian, industri, dan jasa pedesaan dengan demikian angka pengangguran dan kemiskinan dapat di turunkan. Untuk tercapainya pembangunan tersebut ada beberapa faktor yang pengaruhnya sangat besar yang harus selalu diperhatikan sehingga dampak dari pembangunan ekonomi desa tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, yaitu : faktor alokasi anggaran pemda, infrastruktur, dan investasi. Faktor-faktor tersebutlah yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pedesaan, kecamatan, maupun kabupaten dan kota.

Gambaran ekonomi dan sumber daya alam secara umum bahwa potensi wilayah desa di Kabupaten Cirebon merupakan daerah pertanian dan matapencaharian masyarakatnya didominasi oleh sektor pertanian (65,7 %) yaitu pertanian pangan, perkebunan tebu, peternakan, serta nelayan dan hanya sebagian kecil yang merupakan daerah non pertanian (34,3 %) yaitu perdagangan skala kecil dan industri kecil, adapun penggunaan lahan di wilayah ini didominasi oleh area pertanian yakni mencapai 82,92 % atau 24.293,5 Ha. Adapun potensi sumber daya manusia desa tertinggal mencapai 476.126 jiwa dari jumlah tersebut sebanyak 24.3964 atau 51,24 % merupakan penduduk miskin. Jika dilihat pendidikannya, secara umum kondisinya relatife masih rendah, dengan komposisi ; buta hurup : 27.852 (13,18 %), tidak tamat SD : 54.054 jiwa (25,58%), tamat SD/SMP : 110,337 jiwa (52,21 %), dan tamat SMA : 19.087 (9,03%). Fisik prasarana wilayah, secara umum dukungan sarana prasarana wilayah rata-rata belum memadai (BAPPEDA 2004, h. 6-10). Untuk memberikan solusi atas fenomena seperti yang diuraikan diatas, terlebih dahulu perlu diadakan penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi pada faktor-faktor (1) Alokasi Anggaran Pemda, (2) Infrastruktur, dan (3) Investasi, (4) pelaksanaan pembangunan, (5)

lapangan pekerjaan, dan (6) Pendapatan Masyarakat desa, sehingga pembangunan perdesaan sebagai bagian integral pembangunan nasional mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian yang teridentifikasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat kesenjangan distribusi penduduk baik desa maupun kecamatan sehingga menyebabkan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Cirebon.
2. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendapatan antara desa tertinggal dan desa tidak tertinggal di Kabupaten Cirebon.
3. Belum dioptimalisasikannya sumber-sumber daya ekonomi yang cukup melimpah di Kabupaten Cirebon guna meningkatkan pembangunan ekonomi.
4. Terbatasnya besaran alokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi desa.
5. Minimnya infrastruktur yang tersedia untuk pembangunan ekonomi desa.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ekonomi desa di kabupaten Cirebon

Sejumlah permasalahan strategis yang disebutkan di atas memberikan makna bahwa di kabupaten Cirebon terdapat permasalahan yang terkonsentrasikan pada aspek pembangunan ekonomi desa. Aspek ini dalam penelitian pembangunan ekonomi ini ditetapkan sebagai fokus bahasan penelitian.

Dari identifikasi masalah di atas, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang luas, sehingga perlu memberi batasan masalah secara jelas dan fokus. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada penekanan kajian atas kebijakan pemerintah dalam alokasi anggaran pemda dan infrastruktur yang merupakan variabel bebas. Alokasi anggaran merupakan faktor yang sangat penting mengingat anggaran merupakan faktor utama yang menggerakkan faktor-faktor lain dalam pembangunan ekonomi seperti infrastruktur dan investasi. Tanpa adanya ketersediaan anggaran yang maksimal serta kemampuan untuk mengelola anggaran dengan baik, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai variabel *intervening* adalah pembangunan ekonomi desa dan penciptaan lapangan pekerjaan, sedangkan pendapatan masyarakat desa sebagai variabel terikat. Di samping itu, hasil penelitian ilmiah yang telah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti yang

mengkaji tentang pembangunan ekonomi desa, faktor anggaran, infrastruktur dan investasi memberikan pengaruh yang signifikan. Misalnya, penelitian Dini Gemala Sari “hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tahun 2010”, hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat kuat lemahnya korelasi (hubungan) kedua variabel terdapat hubungan yang cukup berarti antara alokasi dana desa dengan pembangunan desa. dan tingkat signifikansi pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa menunjukkan besarnya pengaruh dengan terdapatnya hubungan yang positif antara alokasi dana desa dengan pembangunan desa. Mengingat kebermaknaan pengaruh yang signifikan tersebut, penelitian ini menentukan bahwa faktor anggaran dan infrastruktur tidak bisa diabaikan dan dijadikan faktor penentu utama sebagai faktor keberhasilan pembangunan ekonomi desa.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini diungkapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon?.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari variabel kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon?.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Istilah pembangunan ekonomi atau ada kalanya pembangunan saja, merupakan istilah yang sudah sering kita dengar dan baca. Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat, sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sadono Sukirno 2006, h. 3). Sedangkan menurut pendapat Sondang P. Siagian (2008, h. 4) pengertian pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Adapun kaitannya dengan definisi tentang pembangunan



tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebagai berikut ;

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Pembangunan diartikan sebagai peningkatan taraf hidup yang diwujudkan dengan meningkatnya pendapatan (pertumbuhan). Pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan

mempertahankan kenaikan tahunan atas Pendapatan Nasional Bruto atau GNP pada tingkatan tertentu. Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut penerimaan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor manufaktur dan jasa yang secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Konsep pembangunan Nasional secara komperhensif meliputi pembangunan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi, selain mengupas cara-cara alokasi sumber daya produktif langka seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan, baik yang terkandung dalam sektor swasta maupun yang terdapat di sektor pemerintah/ publik. Semua mekanisme itu terbukti sangat diperlukan demi perbaikan standard hidup secara cepat. Todaro dalam Suryana (2000, h. 6) menyebutkan tiga aspek komponen penting pembangunan yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki antara lain : (i). Kecukupan/kebutuhan hidup (*sustenance*), (ii). Jati diri/kebutuhan harga diri (*self-esteem*) (iii). Kebutuhan kebebasan (*freedom*). Oleh sebab itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti harus ada adalah :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian / pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup , seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri

untuk investasi baru, (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana 2000, h. 3)

Dalam melakukan peranannya mengarahkan pembangunan, pemerintah perlu memperhatikan keterkaitan antara sektor ekonomi dengan demikian pemerintah dapat menggunakan kebijakannya secara efektif dan efisien. Pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik melalui instrumen pengeluaran pemerintah itu sendiri maupun merangsang pertumbuhan investasi, konsumsi rumah tangga dan ekspor, disamping faktor-faktor : alokasi anggaran pemda, infrastruktur dan investasi untuk percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya.

Berdasarkan uraian tentang konsep pembangunan ekonomi diatas, maka dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada kurangnya perhatian dalam pemerataan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang baik dengan demikian diharapkan selain dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga sekaligus dapat diwujudkan pemerataan. Propinsi, kota dan kabupaten merupakan suatu kesatuan wilayah sebagai bingkai negara kesatuan RI, dengan demikian pemerataan pembangunan pada wilayah propinsi, kota dan kabupaten mutlak diperhatikan secara merata dengan pembangunan nasional. Hal ini berarti perencanaan pembangunan ekonomi nasional harus sejalan dengan perencanaan pembangunan suatu wilayah baik propinsi, kota dan kabupaten. Oleh karena itu pembangunan ekonomi regional adalah bagian integral dari pembangunan nasional untuk itu bahwa proses pembangunan suatu negara menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan, Pemerintah mempunyai peranan membimbing, mengarahkan dan memberikan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat wajib berpartisipasi aktif demi suksesnya pembangunan. pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dibanding dengan waktu sebelumnya dalam jangka panjang. Perubahan ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pendapatan per kapita riil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan tehnik berproduksi untuk menghasilkan produk yang bermutu, pertumbuhan penduduk yang terkendali, dan peningkatan perdagangan luar negeri (ekspor).



## 2. Pembangunan Ekonomi Daerah.

Setiap pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi-potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merangsang dan membangun perekonomian daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan “terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional dan berkelanjutan”. Dalam konteks tersebut, pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru pembangunan daerah, berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup serta penerapan *good governance*, dengan strategi sebagai berikut : a) mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan daerah, b) mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah, c) mendorong terciptanya keselarasan dan keserasian pembangunan antar daerah, d) mendorong dan memfasilitasi pengembangan / pendayagunaan potensi daerah, e) mengembangkan fasilitas penataan dan pengelolaan lingkungan hidup, f) mengembangkan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan usaha daerah, dan g) mengembangkan SDM aparatur pengelola pembangunan daerah yang profesionalisme dalam pelayanan pembangunan di daerah (Tjahya Supriatna 2004, h. 19). Adapun menurut Suparmoko (2001, h.18) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah a) memberdayakan masyarakat, b) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, c) meningkatkan peran serta masyarakat, dan d) mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pembangunan ekonomi daerah dibagi dalam berbagai sektor-sektor, pembangunan perekonomian mengklasifikasikan sektor-sektor perekonomian dalam 9 sektor, yaitu: 1). Sektor pertanian, 2). Sektor pertambangan/penggalan, 3). Sektor industri pengolahan, 4). Sektor listrik gas dan air bersih, 5). Sektor bangunan/konstruksi, 6). Sektor perdagangan, hotel dan restoran, 7). Sektor pengangkutan dan komunikasi, 8). Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, dan 9). Sektor jasa – jasa. Pembangunan tersebut secara umum dapat dikelompokkan kedalam pembangunan daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Daerah perkotaan selama ini telah diarahkan sebagai pusat industri dan perdagangan, disamping sebagai pusat

pemerintahan, sedangkan daerah pedesaan diarahkan sebagai pusat produksi pertanian.

### **3. Pembangunan Ekonomi Desa.**

Adapun pengertian pembangunan pedesaan menurut Mubyarto dkk (2005, h. 36) bahwa pembangunan pedesaan haruslah berarti pembangunan bagi penduduk pedesaan yang termiskin. Kepada kelompok inilah prioritas harus diberikan karena tanpa pemberian perhatian dan prioritas khusus, mereka akan terhimpit oleh 2 fenomena yang akan selalu dimanfaatkan lebih dulu oleh mereka yang kuat dan tidak miskin, sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita (2006, h. 17) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). Untuk itu pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai : (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Menurut Innayatullah dalam Sulistiyo Ninik Sri Rejeki dan Mubyarto (2005, h. 113) Pembangunan pedesaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial, yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Definisi ini menimbulkan dua implikasi. Pertama, peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial tersebut hanya dapat terjadi apabila pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian mereka; dan kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan sosial tersebut tidak terbatas pada kelompok kuat di pedesaan melainkan harus merata diantara penduduk pedesaan. Kedua hal ini penting karena dengan demikian penduduk pedesaan akan terhindar dari kekuatan-kekuatan luar yang mengurangi potensi mereka dan membatasi keikutsertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan

sebaik-baiknya segala dana dan upaya bagi peningkatan pendapatan dan tarap hidupnya (Mubyarto dkk 2005, h. 7), sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita (2006, h. 68) mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan daerah pedesaan yang serasi dan berkeadilan antara lain (1) belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana (fisik dan non fisik) keseluruh desa. (2) masih terdapatnya desa dan kawasan pedesaan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung sentralitis, dan konsentrasi pada pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat daerah pedesaan yang maju. (3) belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang bertumpu pada keunggulan geografis dan sumber daya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan, (4) belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan pedesaan.

Pembangunan ekonomi dikatakan sudah mencapai tahap tinggal landas. Walaupun demikian ternyata strategi pembangunan ekonomi diakui ada ketertinggalan pada pembangunan ekonomi lapisan bawah, pada sektor yang disebut “ekonomi rakyat”. Upaya-upaya pemerataan tidak bisa lain dari pada membangun ekonomi rakyat yang merupakan landasan utama ekonomi bangsa sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki adanya perekonomian kekeluargaan yang adil yang memperhatikan rakyat kecil di desa-desa. Dengan demikian pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi, dan terlebih penting dalam tahap tinggal landas ini, harus dilakukan pembangunan desa di tempat di mana bagian besar ekonomi rakyat berproses. Untuk bisa terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi masyarakat perlu diperdayakan terlebih dahulu sehingga bisa secara optimal aktif terlibat langsung pada pembangunan ekonomi, Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007, h. 21), mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan dalam konsep wacana pembangunan masyarakat pedesaan perlu dilakukan adanya strategi dan kebijakan anatar lain : (1). Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*). Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/asset keluarga miskin. Dengan demikian, keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, (2). Strategi akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*). Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin yang ditandai dengan semakin meningkatnya kehadiran



keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya prasarana dan sarana dasar, (3). Strategi perlindungan social (*social protection*). Strategi ini bertujuan meningkatkan perlindungan social kepada keluarga miskin yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh system perlindungan sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin, (4). Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*). Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe dengan mendapat sisipan m dan akhiran an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan penerjemahan dalam bahasa inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna dalam kamus inggris-indonesia adalah *empower* yang berarti menguasai/memberi kuasa yang juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya tetapi juga kekuasaan (Echols dan Hassan Shadily 2005, h. 211)

Pada hakikatnya konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan untuk mengatasi permasalahannya perlu dilakukan adanya strategi dan kebijakan yang selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan, dan pada dasarnya pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa peranan desa di Indonesia sangat penting berkenaan dengan potensi yang dimilikinya sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional, namun potensi yang sangat baik itu tidak didukung oleh pengetahuan (modal intelektual) serta penyediaan sarana dan prasarana yang sepadan, sehingga pembangunan pedesaan tidak optimal.

Sehingga tingkat produktivitas sangat rendah, dan kegiatan ekonomi tidak dapat menyerap tenaga kerja yang siap kerja dan masih menganggur. Dalam sejarah ketatanegaraan pemerintahan sebagai unit pemerintahan terendah masyarakat. Pengaturan tentang desa terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah sebagaimana undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dioperasikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005, sehingga diharapkan lebih menampakkan sosok desa yang sejahtera masyarakatnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dikaitkan dengan pembangunan ekonomi desa adalah merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Proses adalah serangkaian kegiatan-kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah pengangguran dan kemiskinan. Tujuan pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial : yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki keberdayaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, dengan demikian masyarakat akan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri guna meningkatkan pendapatannya.

Menarik kesimpulan dari uraian tersebut diatas, bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat mampu berdaya guna agar mampu menguasai kehidupannya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang multi dimensional yang kompleks dan melibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan, dan keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, (2) meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih.

#### **4. Tujuan Pembangunan Ekonomi Desa.**

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke taraf yang lebih baik, keberhasilan program-program pembangunan akan dapat dilihat melalui kenyataan-kenyataan kongkrit apakah hal-hal yang menyangkut berbagai macam aspek kehidupan masyarakat seperti lapangan pekerjaan, pendapatan, sandang pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya sekarang telah lebih baik keadaannya dari sebelum

pembangunan dilaksanakan. Menurut Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (2007, h. 136-137) berbicara tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka tidaklah dapat diabaikan pengertian, latar belakang, pendekatan, konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerah-daerah yang berbeda-beda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang sangat penting artinya bagi pembangunan desa yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. Berdasarkan kepada dasar-dasar pikiran tersebut, maka pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan dalam pembangunan desa dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip pembangunan desa, meliputi :
  - a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
  - b. Dinamis dan berkelanjutan.
  - c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.
2. Pokok-pokok kebijakan pembangunan desa, adalah :
  - a. Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam.
  - b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
  - c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat.
  - d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi.
  - e. Peningkatan kehidupan ekonomiyang kooperatif.
3. Sasaran pembangunan desa  
Menjadikan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.
4. Obyek dan subyek pembangunan  
Yang menjadi obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup pula segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Usaha pembangunan desa juga diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang mantap.
5. Mekanisma pelaksanaan.  
Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan system perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) melalui lembag ketahanan masyarakat desa di tingkat desa dan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan.

Sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita (2006, h. 19) bahwa pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan dengan ruang lingkup :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan meliputi (pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya)
2. Pemeberdayaan Masyarakat
3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)
5. Penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*)

Dari uraian di atas, maka sebaiknya program pembangunan perdesaan harus selaras dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia yaitu : a) biasa bekerja keras, b) tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, c) gotong royong / kerja bakti, dan memiliki jiwa gotong royong, d) memiliki musyawarah dan jiwa musyawarah. Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, sedangkan tujuan pembangunan pedesaan secara spesial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dengan sasaran pembangunan pedesaan terciptanya (a) peningkatan produksi dan produktivitas, (b) percepatan pertumbuhan desa, (c) peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, (d) peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, (e) perkuatan kelembagaan (Rahardjo Adisasmita 2006, h. 18) Pembangunan ekonomi juga mengandung pengertian mengenai perubahan, perubahan teknik produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih bermutu, perubahan pola kesempatan kerja, perubahan tingkat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan perdagangan luar



negeri, perubahan dalam kesejahteraan masyarakat (Arief M. Idris 2003, h. 1-2), sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan baru (Arsyad Lincoln 2004, h. 298) sedangkan menurut Yuyun Wirasasmita (2006, h. 1). membedakan antara ekonomi pembangunan dan pertumbuhan menurutnya bahwa ekonomi pembangunan menganalisis perkembangan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi, sedangkan ekonomi pertumbuhan menganalisis pemerataan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi.

Pertumbuhan dan pembangunan sering digunakan secara sinonim di dalam risalah ekonomi. Kedua istilah itu bisa mempunyai arti yang berbeda, implisit dalam penggunaan umum dan eksplisit dalam apa yang menggunakannya. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi berarti lebih banyak output. Pembangunan ekonomi menyatakan tidak hanya lebih banyak output tapi juga lebih banyak macam output dari pada yang diproduksi sebelumnya (Bruce Herrick dalam Komarudin 2005, h. 25). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa istilah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering dipergunakan secara bergantian namun ada yang membedakannya yaitu dari luasnya kajian, Ekonomi pembangunan lebih luas kajiannya karena menyangkut faktor ekonomi dan non ekonomi sedangkan pertumbuhan hanya menganalisis faktor-faktor ekonomi saja. Faktor-faktor ekonomi meliputi (1) sumber daya alam, (2) sumber daya manusia, (3) modal dan (4) teknologi. Sedangkan faktor-faktor non ekonomi meliputi (1) falsafah hidup masyarakat/bangsa, (2) kelembagaan-kelembagaan sosial, (3) sistem sosial, (4) budaya, (5) pemerintah, (6) sistem politik, (7) hukum, (8) keamanan (Yuyun Wirasasmita 2006, h. 2). Untuk mencapai hasil yang maksimal maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat empat jenis strategi yaitu : (1) Strategi pertumbuhan, untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan, (2) Strategi Kesejahteraan, untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana social

lainnya, (3) Strategi responsive terhadap kebutuhan masyarakat, untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan, (4) Strategi terpadu dan menyeluruh, yang menyangkut tujuan-tujuan kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan (Rahardjo Adisasmita 2006, h. 21).

Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu masyarakat atau suatu bangsa diperlukan tolak ukur dengan indikator-indikator yang sesuai dengan pengertian-pengertian yang tersirat dalam konsep dan definisi dari pembangunan yang dilaksanakan meliputi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan (Subandi, 2008, h.32). Secara universal parameter untuk sumber daya manusia adalah *Human Development Index(HDI)*, atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia saat ini (71,1) berada diperingkat 108 dari 177 negara, sementara Filipina 76,3, Thailand 78,4, Malaysia 80,5, Singapura 91,6, (UNDP, 2007). Sedangkan IPM ditentukan oleh tiga faktor komposit yaitu : indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli, (1) bidang pendidikan ; pemerintah berkonsentrasi dan fokus kepada kabupaten/kota yang pencapaian RLS dan AMH-nya ekstrim rendah serta perlu adanya sinergitas program pendidikan untuk meningkatkan daya beli melalui *income generating education*, (2) bidang kesehatan ; kebijakan alokasi anggaran yang memadai untuk bidang kesehatan, sekurang-kurangnya 10% dari APBD, mobilisasi potensi masyarakat untuk percepatan penurunan angkat kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dan sinergitas lintas OPD dan multimedia dalam kampanye perlu hidup bersih dan sehat (PHBS), (3) bidang daya beli : mendorong kebijakan yang mampu memobilisasi fasilitas ekonomi untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam perluasan usaha dan penyerapan tenaga kerja (BAPEDA Provinsi 2011, h. 9)

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa strategi dan tujuan pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dibanding dengan waktu sebelumnya dalam jangka panjang dengan memperhatikan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang meliputi : prinsip-prinsip pembangunan desa, pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa, sasaran pembangunan desa, obyek dan subyek pembangunan serta mekanisma pelaksanaan. Sehingga menjadi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang dijadikan sebagai ukuran kinerja Pemerintah. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB). Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari: indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil per kapita)

## **5. Alokasi Anggaran Pemda**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah diantaranya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatandan belanja daerah adalah sebagai berikut :

Sumber penerimaan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan (PPh) perorangan, sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian (nontifikasi)
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014)

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan, sedangkan pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah yang dikelola untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di daerah tersebut baik yang bersifat kegiatan rutin maupun pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama yaitu sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan non asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil sumber daya dan kegiatan ekonomi daerahnya sendiri, sedangkan pendapatan non asli daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan dari luar daerah (Pulasna Putarta, 2006, h.241). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Chabib Soleh (2010, h 42), anggaran daerah yang telah disusun akan meliputi empat tahap yang terdiri dari atas :

1. Perencanaan anggaran
2. Pembahasan dan penetapan anggaran
3. Pelaksanaan anggaran
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Dari uraian pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa aspek penganggaran merupakan lanjutan dari aspek perencanaan. Melalui musyawarah rencana pembangunan nasional aspek perencanaan dan penganggaran dalam setiap level pemerintahan disinergikan. Mekanisme penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah diatur melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah



(PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan, seperti yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 yang mencakup kebutuhan anggaran untuk pembangunan, ketersediaan alokasi anggaran serta kemampuan dalam mengelola anggaran.

## **6. Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan dalam jaringan distribusi, sumber energy, dan input produksi lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional (Rencana Kerja Pemerintah, 2012)

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negeri tetangga. Keteringgalan dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tetapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. Melihat keteringgalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah kemudian menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan yang sangat mendesak saat ini. Namun pembangunan infrastruktur itu bukannya tanpa kendala, persoalan utamanya pada masalah pendanaan pemerintah yang sangat terbatas. Berbagai sub-sektor infrastruktur pasca reformasi hingga saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Di sub-sektor irigasi hingga tahun 2002, sekitar 1,5 juta hektar dari 6,7 juta hektar jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan dan berat dan pemerintah hanya mampu menyediakan 40 % - 50% biaya operasi dan pemeliharaan. Sekitar 15 ribu – 20 ribu hektar per tahun lahan pertanian beririgasi teknis beralih fungsi (konversi) menjadi lahan non-petanian dan hal ini bila tidak diantisipasi secara serius, maka akan mengganggu pemenuhan produksi beras nasional. Sub-sektor jalan pada

tahun 2000, sepanjang 140 ribu km jalan atau (48 % dari 291,5 ribu km) dalam keadaan rusak ringan dan berat. Sepanjang 8.798 km jalan nasional dan jalan propinsi berada dalam kondisi rusak pada tahun 2000 dan 134.443 km untuk jalan kabupaten. Kondisi serupa juga terjadi pada sub-sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi masih rendah yaitu sekitar 58 % pada tahun 2001, tidak ada investasi baru (pembangkit baru) mengakibatkan 28 daerah di luar Jawa-Bali mengalami krisis listrik. Seperti kondisi infrastruktur lainnya, penyediaan air bersih pun masih menjadi kendala, saat ini terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas air baku. Sistem dan jaringan prasarana dan sarana masih terbatas (Bappenas, 2012).

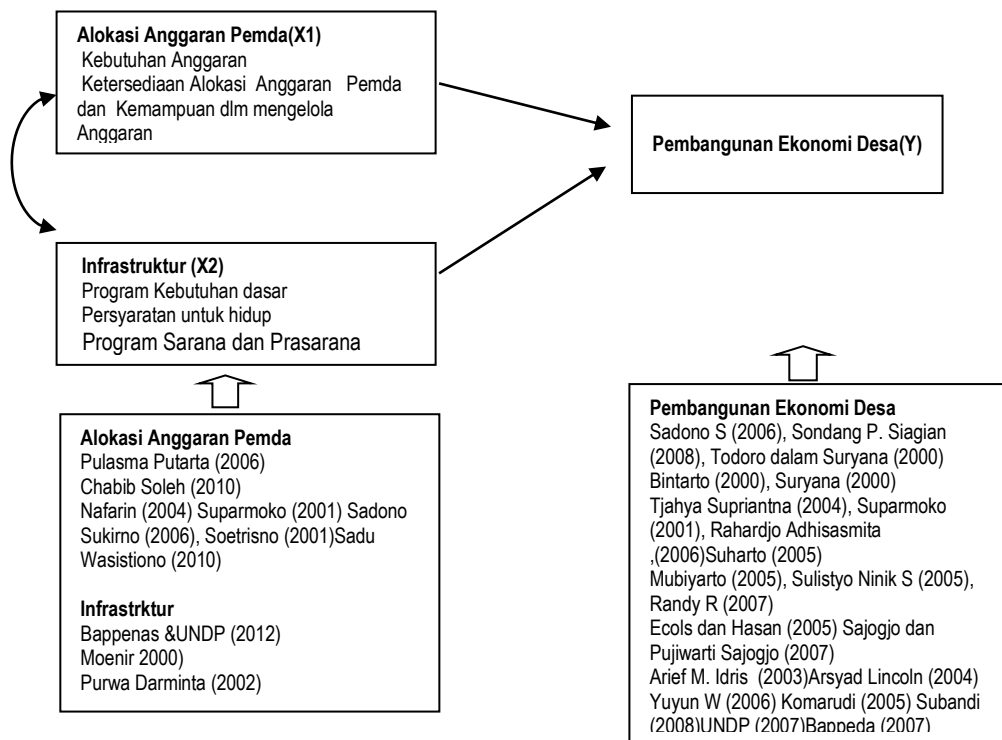
Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa adalah ketersediaan kelengkapan infrastruktur yang ada disuatu daerah dikaitkan dengan fungsi pelayanannya guna memudahkan pelayanan dan aktivitas masyarakat di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta sosial ekonomi dan keamanan yang meliputi infrastruktur jalan, transportasi, irigasi, listrik, dan lembaga-lembaga sosial. Keempat jenis infrastruktur tersebut sangat penting bagi menunjang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

## **7. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **7.1. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembangunan ekonomi perdesaan merupakan bagian integral serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi perdesaan di daerah merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangunan nasional, begitu juga sebaliknya kegagalan pembangunan ekonomi perdesaan merupakan bagian dari kegagalan pembangunan nasional, terutama ketika aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat serta keadilan sosial belum dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan ekonomi perdesaan di daerah. Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang secara substantif telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri (kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama) dalam melakukan kebijakan pembangunan dan menentukan arah pembangunan, yang didasarkan pada

sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya buatan (SDB) yang berupa 1) keuangan atau dana baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan pusat dan daerah serta dana pendapatan daerah yang sah lainnya, untuk membiayai pembangunan infrastruktur (sarana air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana sanitasi lingkungan, sarana angkutan umum, sarana dan prasarana jalan, telekomunikasi, dan listrik) dan ke 2) otoritas yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ramah investor untuk melakukan investasi di daerah. Adapun paradigma penelitian dalam bentuk yang lebih sistimatis, seperti yang digambarkan pada Gambar 1. di bawah ini



## 7.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka pemikiran, selanjutnya dirumuskan Hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon

2. Kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon

## OBJEK PENELITIAN

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian .

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan penelitian memakan waktu selama 12 ( Dua belas) bulan, sejak bulan Januari sampai Desember 2010.

### 2. Populasi dan Metode Penetapan Sampel.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan sampling, jumlah populasi adalah pegawai desa/kelurahan 446 orang, pegawai kecamatan 45 orang dan tokoh masyarakat 99 orang sehingga total populasi 590 orang.

Metode penetapan sampel yang dipakai yaitu *Porpositive stratistified random sampling method*. Sampel yang ditetapkan oleh peneliti, terlebih dahulu distarakan berdasarkan tingkatan pendapatan masyarakat. Adapun rumusan yang digunakan dalam penetapan sampel adalah menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ .

$$\text{Sehingga, } n = \frac{N^2 \cdot d^2}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{590^2 \cdot (0,05)^2}{590 \cdot (0,05)^2 + 1} = 262,22 \text{ responden}$$

Peneliti menetapkan jumlah responden sebanyak 262,22 responden. Namun demikian peneliti menambah responden sehingga menjadi 270 responden.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Adapun berdasarkan metode pengumpulan datanya penelitian ini termasuk penelitian survai dimana penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi dan teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.



#### 4. Instrumen Penelitian dan Disain Penelitian

Adapun data penelitian menggunakan kombinasi data primer dan data skunder. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner atau angket sedangkan data skunder dengan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun diagram jalur dan persamaan jalur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### Struktur

$$Y = f(X)$$

$$Y = f(X_1; X_2)$$

$$Y = p_{YX1} X_1 + p_{YX2} X_2 + \epsilon_1$$

Dimana:

Y = Pembangunan ekonomi desa

X1 = Alokasi anggaran pemda

X2 = Infrastruktur

$p_{YXi}$  = Koefisien jalur variabel bebas terhadap variabel terikat

$\epsilon_1$  = Pengaruh variabel lain diluar model

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya peneliti perlu dilakukan pembahasan lebih jauh tentang kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi pedesaan tersebut. Guna dapat mencari dan menemukan pokok – pokok masalah yang menunjang optimalisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi desa tersebut. Di samping itu dalam pembahasan ini akan menjelaskan secara komprehensif mengenai hubungan di antara variabel bebas dan besaran koefisien jalur dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta besaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari masing variabel tersebut. Untuk selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

### A. Hasil Analisis

Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan pada 270 responden dengan tingkat signifikansi 5%. pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS *versi 17 for Windows*. Adapun hasil pengujian reliabilitas untuk nilai koefisien alpha cronbach, dapat dijelaskan pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1.**  
**Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas**

Variabel	Uraian	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Kesimpulan
X <sub>1</sub>	Anggaran	0,806	0,700	Reliabel
X <sub>2</sub>	Infrastruktur	0,781	0,700	Reliabel
Y	Pembangunan Ekonomi Desa	0,909	0,700	Reliabel

Tabel 4.1, memperlihatkan bahwa seluruh variabel dalam model penelitian nilai r hitung nilainya lebih besar dari 0,700 (r hitung >0,700 atau r tabel). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur semua variabel dinyatakan reliabel atau mempunyai konsistensi tinggi.

Sesudah pengujian data maka, selanjutnya peneliti melakukan pengkajian analisis kualitatif sebagai gambaran fenomenal dari variabel penelitian pada saat sekarang ini. Adapun penetapan kriteria nilai rata-rata jawaban dari responden tersebut dimasukkan ke dalam kelas-kelas interval, dimana penentuan intervalnya memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Interval kelas}}$$

Keterangan:

Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1, jumlah kelas adalah 5. Dari rumus diatas, diperoleh nilai Interval kelas = 0,8 , sehingga berlaku ketentuan kategori dengan hasil bisa dilihat pada Tabel 2. di bawah in.

**Tabel 2.**  
**Nilai interval dan katagori jawaban responden**

Nilai Interval	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Sedang
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Untuk lebih jelasnya jawaban responden dapat di uraikan sebagai berikut:

Nilai rata-rata jawaban setiap variabel pertanyaan dari 270 responden, dapat di jelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.**  
**Nilai rata-rata standar deviasi jawaban responden**

Variabel	N	Rata-rata	Standar deviasi
Anggaran	270	3,233	1,47129
Infrastruktur	270	3,466	1,36226
Pembangunan Ekonomi Desa	270	3,803	1,18948

Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas, bahwa seluruh jawaban responden dapat dikategorikan dalam katagori tinggi hal ini dikarenakan oleh nilai rata-rata (Mean) untuk tiap variabel nilainya di antara interval 3,41–4,20, kecuali untuk variabel anggaran nialinya di antara interval 2,61–3,40, sehingga dikategorikan dengan katagori sedang.

## **B. Pembahasan Analisis Induktif**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya peneliti perlu dilakukan pembahasan lebih jauh tentang kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi pedesaan tersebut. Guna dapat mencari dan menemukan pokok – pokok masalah yang menunjang optimalisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi desa tersebut. Di samping itu dalam pembahasan ini akan menjelaskan secara komprehensif mengenai hubungan di antara variabel bebas dan besaran koefisien jalur dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta besaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari masing-masing variabel tersebut. Untuk selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Besaran pengaruh total (koefisien determinasi) dari variabel Anggaran( $X_1$ )dan Infrastruktur ( $X_2$  ), terhadap Pembangunan Ekonomi Desa (Y), dinyatakan oleh besaran koefisien determinasi yang besarnya adalah sebesar 46 % sedangkan selebihnya sebesar 54 %, merupakan pengaruh variabel lain di luar model. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat dalam Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4.  
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  
Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  Terhadap Variabel Y

Variabel	Pengaruh Langsung	Total Pengaruh Tidak langsung			Total pengaruh langsung dan tidak langsung
		X1	X2		
X1	0.442		0.057	0.083	0.525
X2	0.018	0.057		0.063	0.081
					0,606

Pengaruh langsung dan tidak langsung secara bersamaan dari variabel Alokasi Anggaran Pemda, ( $X_1$ ) dan Infrastruktur ( $X_2$ ) terhadap Pembangunan Ekonomi Desa ( $Y$ ) adalah sebagai berikut :

1). Besaran Pengaruh Langsung

1. Variabel Anggaran, ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel Pembangunan Ekonomi Desa ( $Y$ ) sebesar 44,2 % ( $R^2_{yx_1}$ ),
2. Variabel Infrastruktur ( $X_2$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel Pembangunan Ekonomi Desa ( $Y$ ) sebesar 1,8 % ( $R^2_{yx_2}$ ),

2). Besaran Pengaruh Tidak langsung

1. Besaran pengaruh tidak langsung variabel alokasi anggaran pemda ( $X_1$ ) melalui kedua variabel bebas lainnya terhadap Pembangunan Ekonomi Desa ( $Y$ ) sebesar 8,3 % ( $R^2_{yx_1}$ ).
2. Besaran pengaruh tidak langsung variabel infrastruktur ( $X_2$ ) melalui kedua variabel bebas lainnya terhadap Pembangunan Ekonomi Desa ( $Y$ ) sebesar 6,3% ( $R^2_{yx_2}$ ).

a). **Pengaruh alokasi anggaran pemda terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon.**

Hasil penghitungan analisis jalur dimana dapat diketahui besaran pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total langsung dan tidak langsung variabel alokasi anggaran terhadap pembangunan ekonomi desa memberikan pengaruh yang sangat signifikan, dengan besaran pengaruhnya sebesar 44,2 persen. Hal ini mengartikan bahwa alokasi anggaran merupakan variabel yang paling menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi desa. Besaran pengaruh tersebut, menandakan bahwa alokasi anggaran yang dikembangkan selama ini belum optimal, dan masih perlu di tingkatkan lagi, sehingga alokasi anggaran lebih besar dan lebih efektif untuk peningkatan pembangunan ekonomi desa tersebut.



**b). Pengaruh infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon.**

Hasil penghitungan analisis jalur dimana dapat diketahui besaran pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total langsung dan tidak langsung variabel infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi desa memberikan pengaruh yang sangat signifikan, dengan besaran pengaruhnya sebesar 1,8 persen. Hal ini mengartikan bahwa infrastruktur merupakan variabel yang paling menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi desa.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda, infrastruktur, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa dengan besar pengaruh 46 % dan bobot pengaruhnya tergolong kuat. Untuk pengaruh parsial, pembangunan ekonomi desa lebih dipengaruhi secara positif oleh alokasi anggaran pemda daripada infrastruktur.
2. Sebagai temuan dari hasil penelitian ini, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa model pengaruh kebijakan pemerintah pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cirebon mempunyai tingkat kesesuaian yang sangat tinggi.
3. Hasil analisis model juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa bertumpu pada alokasi anggaran pemda dan infrastruktur.

### **B. REKOMENDASI**

Untuk meningkatkan pengembangan keilmuan dan manfaat bagi penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dasar atau landasan pengetahuan bagi para peneliti yang melakukan penelitian sejenis atau penelitian lainnya yang terkait.
- 2). Perlu melakukan kajian penelitian dalam lingkup yang lebih mendalam dan lebih luas bukan hanya pada variabel-variabel yang sudah diteliti, melainkan perlu menambah variabel bebas dan terikat lainnya, termasuk menambahkan dimensi dari masing-masing variabelnya.

- 3). Dalam penelitian lanjutan perlu menggunakan objek dan daerah penelitian yang lebih luas, serta jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan alat analisis lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad Lincoln, 2004, Ekonomi Pembangunan  
    ,STIEYPK, Yogyakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004, laporan akhir penyusunan  
    masterplan penanggulangan kemiskinan didesa-desa tertinggal di  
    Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon, Cirebon,
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2007, Kabupaten Cirebon,  
    Cirebon,
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, 2011,  
    Propinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistik, 2010, Kota Cirebon dalam Angka, BPS Cirebon,
- Badan Pusat Statistik, 2011, Kabupaten Cirebon dalam Angka, 2010, BPS  
    Cirebon,
- Badan Pusat Statistik, 2011, Propinsi Jawa Barat, BPS, Bandung
- Bachrawi Sanusi, 2004, Pengantar Ekonomi Pembangunan, LPFE UI,  
    Jakarta
- Bappenas, 2012, Rencana Kerja Pemerintah Indonesia, Bidang Sarana dan  
    Prsarana, Jakarta
- Bintarto, 2000, Interaksi desa-kota dan permasalahannya, Ghalia Indonesia,  
    Yogyakarta
- Biro Pusat Statistik, 2000, Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk,  
    BPS, Jakarta
- Biro Pusat Statistik, 2001, Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk,  
    BPS, Jakarta
- Biro Pusat Statistik, 2011, Statistik Jumlah Penduduk dan Pengangguran,  
    BPS, Jakarta
- B.S. Muljana dan Sulastri Surono, 2010, Pembangunan Perdesaan  
    Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan, IPB Press, Bogor
- Chabib Soleh, 2010, Pengelolaan dan Aset Daerah, Fokusmedia, Bandung

- Depdagri, 2007, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa  
Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam  
Negeri,
- Depdagri, 2008, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan  
Daerah, BP. Cipta Jaya, Jakarta
- Depdagri, 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 dan 22 Tentang  
pedoman Penyusunan APBN-APBD Tahun 2012, CV. Tamita Utama,  
Jakarta
- Dini Gemala, 2010, Hubungan Alokasi  
Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten  
Langkat,
- Echols Dan Hasan Shadly, 2005, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia,  
Jakarta
- Edhie Djatmoko, 2000, Prospek Pedesaan Hutan, Perladangan dan  
Pertanian Masa Depan, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto dkk, 2005, Membahas Pembangunan Desa, Aditya Media,  
Yogyakarta
- Pulasna Putarta, 2006, Analisa Penerimaan Pajak Reklame Pemerintah  
Daerah Kabupaten
- Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha  
Ilmu, Yogyakarta
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007,  
Manajemen Pemberdayaan sebuah pengantar dan panduan untuk  
pemberdayaan masyarakat, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sadono Sukirno, 2004, Makro Ekonomi  
Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sadono Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan, Kencana, Jakarta
- Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, 2007, Sosiologi Pedesaan, Gajah Mada  
University Press, Yogyakarta
- Sidik Priadana, 2007, Bahan-bahan Perkuliahan Metodologi Penelitian  
pada Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi,  
Universitas Borobudur, Jakarta
- Sudarsono, 2006, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta
- Suparmoko, 2001, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan  
Daerah, Andi Offset, Yogyakarta
- Tjahya Supriatna 2004, Kemitraan Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah  
dalam Pembangunan Dearah, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah,  
ISSN.1829-5193, Vol I, Edisi Kedua, Porgram Pascasarjana STPDN  
DEPDAGRI RI, Bandung
- Undang-undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, Jakarta, 1994  
Undang-undang No.5 tahun 1979 Tentang Desa  
Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Undang-undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah  
Undang-undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
Whimbo Pitoyo, 2010, Panduan Praktis Hukum Ketenagkerjaan, Visimedia,  
Jakarta Word Development Report, 2001, Washington D.C. The  
Word bank  
World Economic Forum, 1996, *Global  
Competitiveness Report*  
Yustika, 2005, *Perekonomian Indonesia*, Bayumedia Publising  
Yuyun Wirasasmita, 2006, *Ekonomi*